

1. URAIAN UMUM

- 1.1. **Judul Usul** : Peningkatan Kapasitas Birokrasi Pemerintah Daerah Propinsi Di DIJ
Dalam Melakukan Diplomasi Bencana Alam

1.2. Ketua Peneliti

Nama lengkap dengan gelar : Grace Lestariana,S.IP, M.Si
Bidang Keahlian : Analisis Diskursus Bencana, Diplomasi, Negosiasi
Jabatan : Asisten Ahli
Unit Kerja : Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UMY
Alamat Surat : Jl. Lingkar Barat Tamantirto Yogyakarta 55183
Telepon : (0274) 387 656 (122)
Fax : (0274) 387 646
Email : grace_lw808@yahoo.com

1.3. Anggota Peneliti

No	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Instansi	Alokasi Waktu	
	Ratih Herningtyas,S.IP, MA	Pengambilan Keputusan Politik, Diplomasi	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	10 jam/minggu	12bulan

1.7. Objek penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian)

Obyek penelitian adalah para aparat birokrasi desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam mendekonstruksi budaya pulung gantung yang diharapkan akan berperan menjadi aktor strategis untuk mencegah tindakan bunuh diri di wilayahnya

1.8. **Lokasi penelitian:** Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan

1.9. Hasil yang ditargetkan

Ditemukannya model peningkatan kapasitas birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ dalam mengelola issue bencana melalui instrument diplomasi bencana alam. Dari model yang berhasil ditemukan akan disusun menjadi modul untuk disosialisasikan kepada birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ

1.10. Perguruan tinggi pengusul: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

1.11. Instansi lain yang terlibat:

Pusat Studi Bencana Alam UMY, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UMY, Laboratorium Ilmu Hubungan Internasional Fisipol UMY, Institute for Islamic Conflict Resolution, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas Padang.

ABSTRAK

Tujuan akhir penelitian ini adalah tersusunnya modul peningkatan kapasitas birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ dalam mengelola issue bencana alam dengan menggunakan instrument diplomasi bencana alam. Untuk mencapainya akan dilakukan aktivitas ; mengidentifikasi kapasitas birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ dalam mengelola bencana alam gempa bumi, mengidentifikasi kapasitas diplomasi bencana alam dari birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ dalam mengelola bencana alam, mengidentifikasi model, tehnik dan instrument diplomasi bencana alam, dan mengembangkan modul peningkatan kapasitas diplomasi bencana alam bagi birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ.

Pengambilan lokasi penelitian di Propinsi DIJ, terkait dengan telah ditetapkannya ke dua daerah tersebut sebagai daerah rawan bencana gempa bumi. Populasi penelitian adalah birokrasi, baik di level eksekutif maupun legislative, di pemerintah daerah Propinsi DIJ dengan metode sampling *stratified random random sampling*.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penyebaran quisioner, wawancara mendalam dan *focus group discussion* kepada aparat birokrasi di pemerintah daerah Propinsi DIJ. Analisis data dilakukan dengan analisis statistika untuk melihat derajat pengetahuan dan pengalaman aparat birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ dalam melakukan diplomasi bencana alam.

Untuk menyusun modul peningkatan kapasitas birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ dalam melakukan diplomasi bencana alam akan dilakukan penelitian pustaka dan curah gagasan dengan ahli-ahli diplomasi di beberapa universitas di Indonesia.

Key words: Bencana alam, peningkatan kapasitas, diplomasi bencana, birokrasi

BAB I.

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Bencana alam di Indonesia cenderung menjadi fenomena yang terus menerus terjadi. Selama tahun 2008 saja, WALHI mencatat telah terjadi 359 bencana alam yang menimpa sebagian wilayah di Indonesia, meliputi banjir, tanah longsor, dan gempa bumi.¹ Gempa bumi di Aceh (2005), Jogjakarta (2006) dan yang terakhir gempa bumi di Padang (2009) telah menyebabkan kerusakan massif baik dalam konteks korban manusia maupun infrastruktur. Dalam tahun 2010, telah terjadi bencana alam di Wasior Papua berupa banjir bandang, di Mentawai berupa gempa bumi dan tsunami, serta di Yogyakarta berupa erupsi gunung merapi.

Dalam konteks tertentu, bencana seringkali difahami sebagai sesuatu yang bersifat negatif. Namun dalam konteks studi diplomasi, issue bencana alam justru dapat dikelola menjadi issue yang positif untuk menyelesaikan problem sosial, ekonomi, politik dan sosial budaya di daerah rawan bencana. Diplomasi bencana alam merupakan suatu kebijakan sistematis untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam konteks kebencanaan dengan menggunakan fakta potensial dan aktual dari bencana itu sendiri. Fakta aktual dalam konteks bencana alam, dapat dipergunakan untuk menarik perhatian internasional untuk terlibat dalam proses mengurangi derajat kerugian akibat bencana alam. Sedangkan fakta bencana alam dalam konteks potensial, dapat dipergunakan sebagai basis membangun kolaborasi kerjasama regional maupun internasional untuk meningkatkan infrastruktur yang dapat mengurangi derajat kerugian material maupun immaterial dari bencana yang sewaktu-waktu terjadi.

Kebutuhan akan kapasitas penatalaksanaan diplomasi bencana alam menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, terlebih untuk daerah-daerah yang memiliki potensi bencana alam yang berakibat massif seperti di Aceh, maupun Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami bencana alam yang sangat dahsyat seringkali tidak diiringi dengan kapasitas diplomasi bencana alam yang memadai.

¹ WALHI : 359 Bencana Alam di Indonesia dalam <http://www.antaraneews.com/view/?i=1244199032> diakses pada 1 Maret 2010

Penguasaan pemerintah daerah atas penatalaksanaan terhadap diplomasi bencana alam, lebih sering difokuskan kepada persoalan tanggap darurat dibandingkan dengan penatalaksanaan yang berbasis *pre-emptive* melalui kerjasama internasional untuk melakukan investasi modal sosial dan ekonomi untuk menghadapi bencana alam. Hal ini kemudian berakibat proses penatalaksanaan diplomasi bencana alam seringkali bersifat reaksioner, atau meminjam istilah Jusuf Kalla, “bencana alam senantiasa berangkat dari 0”. Kondisi ini difahami menjadi sebab paling krusial tetap banyak korban dan kerusakan infra-struktur yang ditimbulkan akibat bencana alam.

Proses penatalaksanaan management bencana alam yang pro-aktif melalui peningkatan kapasitas birokrasi daerah dalam melakukan diplomasi bencana alam diharapkan akan memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperjuangkan issue bencana alam sebagai modal sosial untuk membangun kerjasama internasional yang produktif bagi proses mengurangi dampak dari bencana alam itu sendiri.²

I.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini memiliki tujuan khusus sebagai berikut;

1. Mengidentifikasi kapasitas birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ dalam mengelola bencana alam gempa bumi tahun 2006,
2. Mengidentifikasi arti penting kapasitas diplomasi bencana alam dari birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ dalam mengelola bencana alam,
3. Mengidentifikasi kapasitas diplomasi bencana alam yang dimiliki birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ dalam mengelola issue bencana alam,
4. Mengidentifikasi model, tehnik dan instrument diplomasi bencana alam, dan mengembangkan modul peningkatan kapasitas diplomasi bencana alam bagi birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ.
5. Menyusun modul peningkatan kapasitas diplomasi bencana alam bagi birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ .

² Lihat lebih jauh dalam pandangan Kemenlu RI dalam memaknai arti penting diplomasi bencana <http://www.rakyatmerdeka.co.id/internasional/2009/12/16/7133/Diplomasi-Kemanusiaan-antara-Indonesia-dan-Hongaria-> atau lihat pernyataan Menlu Martin Natalegawa tentang tangible currency dalam diplomasi http://www.indonesia.go.id/id/index.php/content/view/335/index.php?option=com_content&task=view&id=11803&Itemid=1&news_id=18

6. Mensosialisasikan modul peningkatan kapasitas diplomasi bencana alam bagi birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ.

I.3. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Penelitian tentang peningkatan kapasitas birokrasi pemerintah daerah dalam penatalaksanaan diplomasi bencana alam memiliki arti penting dalam beberapa hal:

Pertama, secara akademis studi tentang diplomasi bencana alam merupakan studi yang belum banyak dikembangkan bahkan dalam jurusan ilmu hubungan internasional di beberapa perguruan tinggi di Indonesia seperti UI, UGM, Unpad, UNair, maupun Unhas. Pelembagaan diplomasi bencana alam sebagai diskursus yang penting di perguruan tinggi akan memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam pengurangan dampak bencana alam.

Kedua, secara praktis studi tentang penatalaksanaan diplomasi bencana di tingkat pemerintah daerah akan memperkuat kapasitas diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional yang berhubungan dengan issue bencana alam. Meningkatnya kapasitas birokrasi pemerintah daerah dalam penatalaksanaan bencana alam akan berkontribusi bagi kesiapan daerah untuk mengelola issue bencana alam secara produktif.

Ketiga, penelitian ini memberikan arti penting diplomasi bencana alam dalam konteks pencapaian kepentingan nasional dalam issue bencana alam, kapasitas birokrasi daerah di daerah yang rawan bencana alam, sekaligus meningkatkan kapasitas birokrasi daerah yang dapat berperan sebagai agen diplomasi bencana alam.

BAB II STUDI PUSTAKA

Studi diplomasi bencana memaknai bencana sebagai sebuah instrument yang penting untuk memperjuangkan kepentingan politik seperti perdamaian, kepentingan ekonomi seperti kolaborasi kerjasama ekoomi antar negara secara lebih intensif, atau kepentingan sosial budaya untuk membangun komunitas humanis dan berkeadaban.

Fenomena bencana alam jika difahami dalam perspektif positif, justru memberikan nilai tambah yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai problem kemanusiaan yang selama ini tak terpecahkan melalui diplomasi politik maupun ekonomi yang seringkali berwatak distributif, menang dan kalah.

Menurut Louise K. Comfort, issue bencana sekarang ini menjadi issue yang sangat krusial bagi peningkatan kualitas kesejahteraan manusia. Bencana harus didefinisikan secara lebih luas, tidak hanya sebatas issue bencana alam semata namun juga bencana penyakit menular yang memiliki efek global seperti endemic virus Flu Burung, Flu Babi, ataupun issue pemanasan global. Pendefinisian bencana sebagai issue global diharapkan akan dapat meningkatkan emphasis dari masyarakat dunia untuk terlibat bersama menyelesaikan problem bencana.

Disaster Diplomacy examines the role of disaster-related activities not just in international affairs and international relations, but also in political conflicts not involving more than one independent state. Disaster Diplomacy also embraces a wide definition of "disaster", not just rapid-onset events such as earthquakes and industrial explosions, but also events which are more diffuse in space and time such as droughts, epidemics, and global changes. These latter events have been termed "chronic disasters", "creeping changes", and "disaster conditions" amongst other terms.³

Studi kontemporer yang dilakukan oleh I. Kelman menunjukkan bahwa bencana tidak selalu menjadi faktor yang buruk bagi masyarakat, namun dalam batas tertentu dapat dikelola untuk menyelesaikan persoalan-persoalan politik dan konflik yang selama ini tak terpecahkan, baik dalam konteks persoalan dalam level nasional maupun antara negara.⁴ Argumen besar dari Kelman adalah bencana justru memberikan ruang yang besar bagi pihak-pihak yang berkonflik ataupun yang bermasalah untuk mencari ruang yang bisa dikerjakan untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan dari bencana alam itu sendiri.

Tesis Kelman semakin menemukan momentumnya dalam beberapa studi berikut.

³ Louise K. Comfort, "Disaster: Agent of Diplomacy or Change in International Affairs?", *Disaster Journal*, 2002

⁴ Kelman, I. 2006. "Disaster Diplomacy: Hope Despite Evidence?". *World Watch Institute Guest Essay*, 2006, Kelman, I. 2007. "Disaster diplomacy: Can tragedy help build bridges among countries?" *UCAR Quarterly*, Fall 2007, p. 6, Kelman, I. 2007. "Weather-Related Disaster Diplomacy". *Weather and Society Watch*, vol. 1, no. 3, pp. 4,9

Studi dari Le Billon, tentang hubungan antara diplomasi bencana alam dengan penyelesaian konflik di Aceh, Srilangka, maupun di Yunani. Dalam 3 kasus ini, penyelesaian konflik etnis justru terfasilitasi secara memadai pasca bencana alam yang terjadi di 3 komunitas tersebut.⁵

Studi Kelman tentang konflik Aceh memberikan gambaran yang sangat menarik. Konflik antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Indonesia, telah berlangsung lebih dari 25 tahun, dan untuk menyelesaikan masalah konflik Aceh telah dilakukan upaya perundingan damai semenjak tahun 1995 dengan melibatkan banyak pihak. Namun upaya damai tersebut senantiasa mengalami jalan buntu. Baru pada perdamaian Helsinki antara GAM dan Indonesia justru mengalami kemajuan yang berarti, di mana perundingan ini terjadi pasca bencana alam gempa bumi dan tsunami di Aceh.⁶

Studi Kelman semakin menunjukkan fungsionalitas diplomasi bencana alam⁷. Dalam studinya menunjukkan bahwa bencana alam juga dapat dikelola untuk menjadi ruang bagi peningkatan kerjasama politik, ekonomi, sosial budaya yang lebih luas. Negara-negara yang tergolong sebagai daerah yang rawan bencana atau potensial mengalami bencana alam, yang sebelumnya tidak melakukan kerjasama yang intensif, bahkan cenderung bermusuhan secara politik, kemudian memilih melakukan kerjasama untuk mengurangi resiko dan dampak bencana. Indonesia, Cina dan Jepang memilih meningkatkan kualitas hubungan kerjasama di samping karena persoalan ekonomi juga tidak dapat dilepaskan dari menjadi semakin menguat tatkala Indonesia kemudian menjadi daerah dengan resiko tsunami seperti halnya Jepang dan China.

Studi tentang fungsionalitas diplomasi bencana alam juga dilakukan oleh Weizhun. Menurut Weizhun, pertumbuhan ekonomi China dalam 10 tahun terakhir ini tidak dapat dilepaskan dari China dalam mengelola bencana alam, baik yang terjadi di China ataupun di luar China untuk dikelola dalam kemasan diplomasi bencana alam. China bukan lagi dianggap sebagai kekuatan yang dianggap musuh, karena China justru

⁵ Le Billon, P. and A. Waizenegger. 2007. "Peace in the Wake of Disaster? Secessionist Conflicts and the 2004 Indian Ocean Tsunami". *Transactions of the Institute of British Geographers*, vol. 32, no. 3, pp. 411-427

⁶ Kelman, I. and J.-C. Gaillard. 2007. "Disaster diplomacy in Aceh". *Humanitarian Exchange*, No. 37 (March 2007), pp. 37-39. Atau lihat dalam Gaillard, J.-C., E. Clavé, and I. Kelman. 2008. "Wave of peace? Tsunami disaster diplomacy in Aceh, Indonesia". *Geoforum*, vol. 39, no. 1, pp. 511-526.

⁷ Kelman, I. 2008. "Disaster Diplomacy: Diplomats should not rely on disasters". vol. 47, 12 April 2008, pp. 8-9

menunjukkan politik emphati untuk terlibat dalam kerjasama dengan negara-negara yang rawan bencana alam. Dari sinilah kemudian investasi China dapat ditanam di negara-negara yang selama ini menolak investasi modal dari China.

The practice of Disaster Diplomacy has a great influence and actual values on improving national and international interests. Disaster Diplomacy is flexible and multiform yet uncertain and there are some restrictions in the process of diplomatic practice. Disaster Diplomacy can also promote the Chinese role "as a responsible and powerful country".⁸

The Cambridge Review telah melakukan serangkaian penelitian tentang proses memaknai bencana ke dalam diskursus diplomasi bencana. Studi dari *The Cambridge Review* menunjukkan temuan yang sangat menarik, bahwa diplomasi bencana alam memberikan peluang yang sangat luas bagi negara-negara yang selama ini terlibat dalam konflik kepentingan politik maupun ekonomi, untuk kemudian memilih bekerjasama daripada meneruskan pilihan untuk berkonflik.

The Cambridge Review of International Affairs which analyse critically the argument for disaster diplomacy as an opportunity to increase cooperation among rival states are re-examined in a CAS framework. Based on the application of CAS to the case studies, the article concludes that creative diplomacy for disaster reduction is most effective at the 'edge of chaos', that narrow region where there is sufficient structure to hold and exchange information, but also sufficient flexibility to adapt new alternatives to meet urgent needs.⁹

Indonesia merupakan daerah yang teridentifikasi sebagai daerah yang rawan terjadi bencana alam yang sangat beragam. Pemaknaan secara negative terhadap kondisi geografis dan topografis yang rawan bencana alam justru akan melahirkan sikap dan kebijakan yang lari dari kenyataan dan realitas kehidupan. Dari beragam studi tentang diplomasi bencana alam justru menunjukkan bahwa Indonesia yang teridentifikasi rawan bencana alam justru dapat memodifikasi realitas ini untuk diubah menjadi energy positif untuk membangun kerjasama yang lebih luas. Hal ini akan dapat dicapai manakala

⁸ Weizhun M, 'The Apocalypse of the Indian Ocean Earthquake and Tsunami'. *World Politics and Economy* (Chinese Academy of Social Sciences), vol. 6 (in Chinese). Atau dalam Weizhun, M. and Q. Tianshu. 2005. "Disaster Diplomacy: A New Diplomatic Approach?". *Shanghai Institute For International Studies International Review*, Spring 2005, pp. 111-124 (in Chinese).

⁹ Kelman, I. and T. Koukis (eds). 2000. 'Disaster Diplomacy', special section in *Cambridge Review of International Affairs* (edited by Charlotte Lindberg Clausen), vol. XIV, no. 1, pp. 214-294

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki *social awareness* terhadap issue diplomasi bencana. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penatalaksanaan diplomasi bencana akan menjadi instrument yang penting bagi daerah untuk meningkatkan kerjasama internasional dengan berbagai pihak untuk menyiapkan infrastruktur dan supra-struktur guna mengurangi resiko dari bencana alam yang setiap saat dapat terjadi.

Dalam konteks studi di Indonesia, studi tentang diplomasi bencana alam merupakan area studi yang belum banyak diteliti oleh ilmuan Indonesia. Paparan di atas menunjukkan bahwa studi diplomasi bencana alam yang menggunakan obyek Indonesia justru dilakukan oleh ilmuan dari Jerman. Dari penelusuran terhadap berbagai artikel jurnal di Indonesia, menunjukkan belum ada satupun artikel jurnal di Indonesia yang membahas topic diplomasi bencana alam. Sebagian besar jurnal yang mengambil issue bencana alam lebih banyak focus pada kajian penatalaksanaan peringatan dini, pembuatan kurikulum pendidikan yang sadar bencana, ataupun seputar internalisasi nilai-nilai agama dan budaya sebagai tentang untuk trauma *healing*.

Peneliti tentang membangun *road map* diplomasi bencana alam sebagai sebuah diskursus baru dalam mensikapi issue bencana alam sebagai sebuah fenomena internasional dalam silabi perkuliahan diplomasi . Sebagai pengajar mata kuliah diplomasi selama kurang lebih 10 tahun, peneliti telah melakukan berbagai riset tentang studi diplomasi, baik dalam konteks diplomasi politik, ekonomi, atau bahkan perang terhadap terorisme maupun obat bius.

Penulis mulai menekuni untuk mengkaji diplomasi bencana alam dalam tiga tahun terakhir, pasca terjadi gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2005, maupun gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006. Apa yang terjadi di Jogja maupun di Padang bukan tidak mungkin dapat terulang kembali, bahkan dengan tingkat kerusakan yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan kawasan yang berada dalam wilayah *Ring of fire* dan sangat rawan gempa, karena terletak di antara pertemuan tiga lempeng yaitu Asia, Pasifik dan Australia. Daerah yang masuk rawan gempa adalah sepanjang pantai

barat Sumatera, sepanjang pantai selatan Jawa, Maluku dan Papua. Daerah di Indonesia yang tidak dilewati lempengan tersebut hanyalah Kalimantan.¹⁰

Dalam asumsi penulis, birokrasi pemerintah sebagai garda depan pelayanan publik dituntut untuk mengedepankan aspek responsivitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Aspek responsivitas menghendaki agar pelayanan publik bisa memenuhi kepentingan masyarakat, termasuk dalam situasi darurat seperti penanganan bencana alam. Sedangkan aspek akuntabilitas mengisyaratkan supaya pelayanan publik lebih mengutamakan transparansi dan kesamaan akses setiap warga negara untuk mendapatkan pelayanan publik yang mereka butuhkan. Proses dan harga pelayanan-pelayanan publik juga harus transparan, dan didukung oleh kepastian prosedur serta waktu pelayanan. Sedangkan aspek efisiensi meliputi pemenuhan pelayanan publik yang cepat, serta hemat tenaga.

Gempa bumi yang terjadi di Aceh, Jogjakarta, dan Padang merupakan situs bencana yang menyebabkan kerusakan yang massif, baik dalam konteks korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur. Terdapat kecenderungan bahwa segala keputusan maupun pengelolaan bencana alam terpusat di Jakarta, sehingga berakibat kepada keterlambatan bantuan dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat korban bencana alam sebagai implikasi birokrasi yang panjang. Proses mengurangi dampak dari bencana alam yang dahsyat tersebut baik dalam konteks jangka pendek berupa pemberian pelayanan medis dan pangan kepada korban gempa, maupun jangka panjang berupa pelayanan rekonstruksi pemukiman dan prasarana umum, memiliki dampak jangka panjang.

Pada skala yang lebih luas, bencana alam dapat melahirkan beberapa problem sosial, ekonomi, politik, dan keamanan yang sangat serius di tingkat nasional sebagai akibat terkonsentrasikannya sumber daya politik, ekonomi, sosial dan keamanan ke daerah bencana. Ketergantungan pemerintah daerah kepada Pusat justru akan memperburuk kapasitas pemerintah daerah untuk mengelola issue bencana, karena akan mudah dituduh oleh banyak *stakeholders* bencana alam sebagai pemerintah yang tidak responsif.

Problem yang juga sering muncul terkait dengan bantuan humaniter internasional adalah adanya misi-misi tersembunyi (*hidden agenda*) dari pihak pemberi bantuan, baik

¹⁰ Pendapat Kepala Bidang Gempa Bumi dan Gerakan Tanah Badan Geologi, I Gede Suantika dalam <http://www.suaramedia.com/dunia-teknologi/sains/18235-potensi-gempa-indonesia-paling-tinggi-di-dunia.html> diakses pada tanggal 14 Maret 2010

atas nama negara maupun LSM internasional.¹¹ Beberapa masalah yang muncul terkait issue ini adalah; **pertama**, kekhawatiran intervensi kekuatan asing sebagai akibat banyaknya tentara asing yang masuk ke wilayah bencana dan memanfaatkannya untuk kebutuhan strategis maupun spionase¹². **Kedua**, kekhawatiran terjadinya *trafficking* terhadap anak-anak korban bencana yang tidak terkelola dengan baik.¹³ **Ketiga**, kekhawatiran terjadi penetrasi misionaris untuk menyebarkan agama tertentu terhadap korban bencana.¹⁴ **Keempat**, masalah politik terkait bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik. Kasus ini mencuat tatkala terdapat sejumlah logistik yang dikelola oleh Satkorlak di terdapat simbol-simbol resmi negara Israel.¹⁵

Beranjak dari studi yang telah dilakukan penulis dalam 3 tahun terakhir ini, penulis mencoba menyusun *road map* penelitian. Pada tahap pertama, perlu dilakukan studi untuk menganalisis kapasitas birokrasi daerah dalam konteks bencana alam. Selama ini terdapat asumsi bahwa birokrasi yang menjalankan fungsi diplomasi adalah kementerian luar negeri, sehingga dalam praktek di lapangan sebagian besar birokrasi di daerah cenderung gagap dengan konsepsi dan operasionalisasi diplomasi. Kedua, setelah teridentifikasi kapasitas pemahaman birokrasi daerah terutama di daerah rawan bencana, maka akan dilakukan program peningkatan kapasitas baik dalam tataran konsep maupun perumusan kebijakan yang terkait dengan diplomasi bencana alam.

Pada tahap ketiga, *road* penelitian tentang issue diplomasi bencana alam agar terlembagakan dalam konteks perundangan-undangan, maupun kurikulum pendidikan baik dalam pendidikan nasional maupun kedinasan. Proses pelembagaan ini penting dilaksanakan agar tidak terjadi mis-interpretasi akibat mis-konsepsi dalam memahami dan melaksanakan praktik diplomasi bencana alam.

¹¹ Lihat dalam <http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/07/02374315/diplomasi.regional.bencana.alam> yang diunduh pada 5 Januari 2010

¹² Issue ini merebak dalam kasus bencana tsunami di Aceh, di mana banyak tentara dari Amerika Serikat maupun Australia yang terlibat dalam proses pemberian bantuan dengan membawa sejumlah peralatan medis maupun non medis berupa kapal tanker.

¹³ Kasus tentang *trafficking* hampir terjadi dalam setiap issue bencana alam, baik di Srilangka, Turki, Iran, Afghanistan, maupun di Aceh dan Padang.

¹⁴ Kasus ini sempat mencuat dalam bencana alam di Padang maupun Aceh, sehingga Pimpinan Pusat Muhammadiyah sempat menolak bantuan yang menyertakan simbol-simbol keagamaan tertentu. Lihat dalam pandangan Sudibyo Markus dalam *Suara Muhammadiyah*, Edisi Maret, 2010.

¹⁵ Lihat lebih jauh dalam <http://www.berita2.com/nasional/umum/1328-menentang-bantuan-israel-untuk-gempa-sumbar.html> yang diunduh pada 3 Januari 2010

BAB III. METODE PENELITIAN

a. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mentransformasi kapasitas birokrasi di pemerintah daerah Propinsi DIJ untuk menggunakan instrument diplomasi bencana alam sebagai salah satu komponen manajemen bencana; 1) bagaimana birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ memandang arti penting diplomasi bencana alam dalam konteks manajemen bencana 2) bagaimana birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ sebagai agen diplomasi bencana alam 3) bagaimana mendiskusikan birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ sebagai birokrasi yang memiliki keahlian diplomasi dalam mengelola bencana alam.

b. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan informasi yang valid, penelitian ini melakukan survai dan *focused group discussion* terhadap kapasitas birokrasi di pemerintah daerah Propinsi DIJ dalam melakukan Diplomasi Bencana untuk mengeksplorasi pengalaman yang berstruktur dari aparat birokrasi dalam mengelola issue bencana.

c. Teknik analisis data

Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk menganalisis kapasitas birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ dalam melakukan diplomasi bencana alam akan dipergunakan analisa statistik melalui survey, dengan menggunakan alat ukur Standar Deviasi, untuk melihat sejauh mana posisi kapasitas birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ dalam melakukan diplomasi bencana alam. 2) Untuk menyusun modul peningkatan kapasitas birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ dalam melakukan diplomasi bencana alam akan dilakukan penelitian pustaka dan curah gagasan dengan ahli-ahli diplomasi di beberapa universitas di Yogyakarta

d. Populasi dan sampel

Populasi penelitian ini adalah birokrasi, baik di level eksekutif maupun legislative, di pemerintah daerah Propinsi DIJ, dengan mengambil sampel penelitian dengan metode *stratified random sampling*.

e. Lokasi penelitian

Pengambilan lokasi penelitian di Propinsi DIJ, terkait dengan posisi geografis Propinsi DIJ yang telah ditetapkan sebagai daerah rawan bencana gempa bumi, pasca gempa bumi 27 Mei 2006 yang telah menyebabkan 7000 ribu penduduk meninggal dunia, 15.000 luka, dan sekitar 200 ribu rumah penduduk rusak parah dan sedang. Maupun bencana erupsi Merapi pada tahun 2010, di mana menyebabkan lebih dari 200 ribu penduduk sekitar lereng Merapi mengungsi. Di mana ada kecenderungan pemerintah daerah Propinsi DIJ belum melakukan diplomasi bencana alam secara maksimal

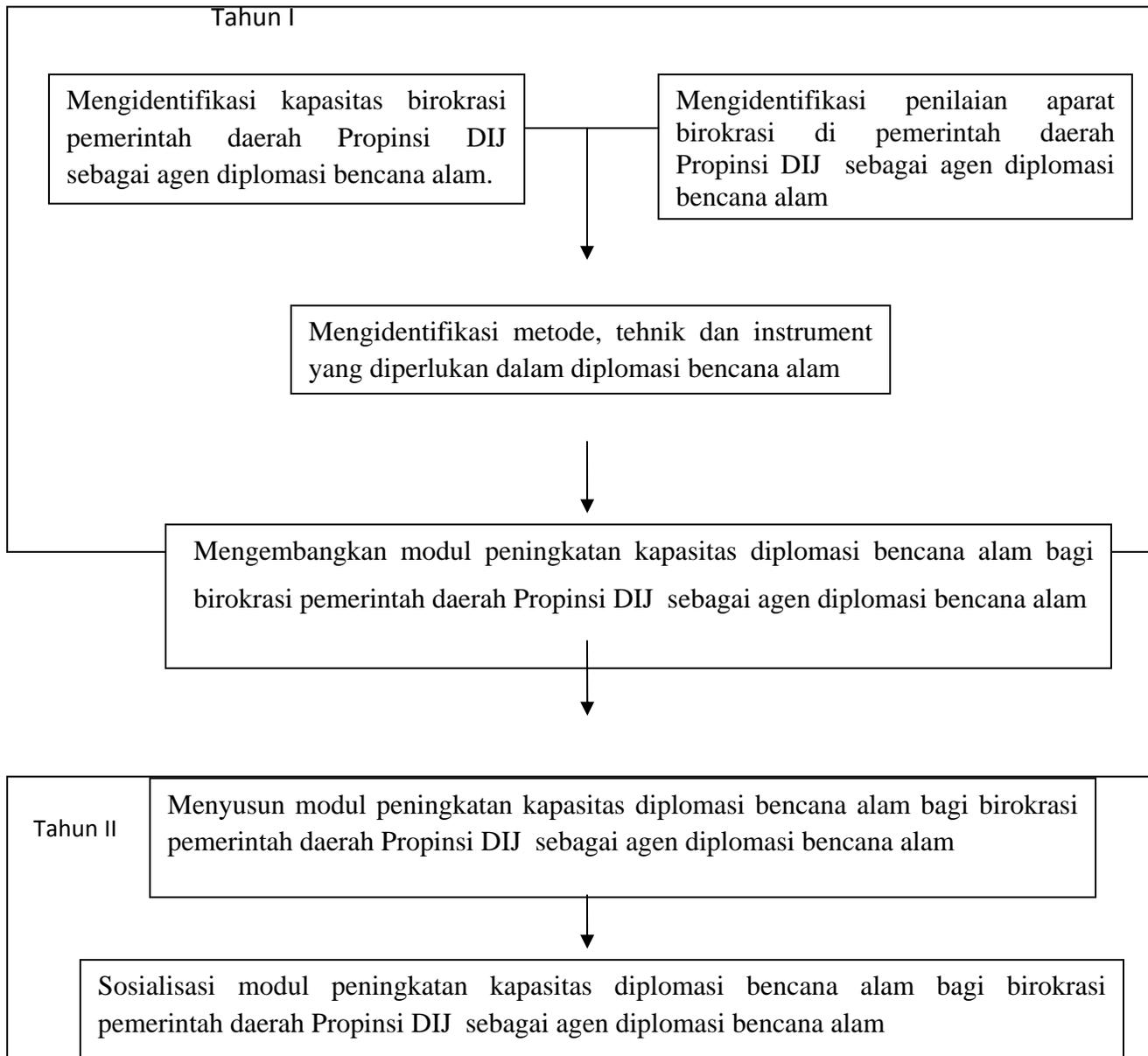
f. Rancangan penelitian

Tahap penelitian dilakukan dengan mengikuti rancangan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi kapasitas birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ dalam mengelola bencana alam gempa bumi tahun 2006, melalui aktivitas ; (a) menentukan subyek penelitian (b) menyusun panduan dan pedoman wawancara
- 2) Mengidentifikasi arti penting kapasitas diplomasi bencana alam dari birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ dalam mengelola bencana alam, melalui aktivitas; (a) menentukan subyek penelitian (b) menyusun questioner
- 3) Mengidentifikasi kapasitas diplomasi bencana alam yang dimiliki birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ dalam mengelola issue bencana alam, melalui aktivitas; (a) menentukan subyek penelitian (b) menyelenggarakan *focus group discussion*
- 4) Mengidentifikasi model, tehnik dan instrument diplomasi bencana alam, melalui aktivitas; (a) melakukan penelitian pustaka (b) melakukan studi ekskursi terhadap daerah yang pernah melakukan diplomasi bencana alam dalam mengelola bencana (c) dan mengkonsultasikan kajian pustaka dan ekskursi tersebut dengan para ahli diplomasi bencana Mengembangkan modul peningkatan kapasitas diplomasi bencana alam bagi birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ sebagai agen diplomasi bencana alam, melalui aktivitas (a) merancang modul peningkatan kapasitas birokrasi daerah Propinsi DIJ sebagai agen diplomasi bencana alam (b) melakukan diskusi terstruktur dalam membuat rancangan model peningkatan kapasitas birokrasi pemerintah daerah (c) melakukan ujicoba model tersebut kepada kelompok kecil (d) penyempurnaan model (e) melakukan desiminasi model

- 5) Menyusun modul peningkatan kapasitas diplomasi bencana alam bagi birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ sebagai agen diplomasi bencana alam, (a) penyiapan materi modul (b) mengkonsultasikan modul kepada pakar dan ahli diplomasi bencana alam
- 6) Uji coba modul dalam forum terbatas yang dilanjutkan dengan revisi (jika diperlukan) dan uji coba dalam forum yang lebih luas.
- 7) Sosialisasi modul peningkatan kapasitas diplomasi bencana alam bagi birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ sebagai agen diplomasi bencana alam, melalui aktivitas (a) mengundang birokrasi pemerintah daerah Propinsi DIJ (b) menentukan jadwal pelaksanaan sosialisasi (c) menentukan narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi (d) pelaksanaan sosialisasi

Kegiatan-kegiatan tersebut dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



BAB IV. PEMBIAYAAN

No	Jenis Pengeluaran	Rincian Anggaran	
		Tahun I	Tahun II
1	Pelaksana (gaji dan upah)	14.700.000	14.700.000
2	Bahan aus (material penelitian)	5.600.000	5.600.000
3	Perjalanan	9.000.000	9.000.000
4	Pertemuan/lokakarya/seminar	5.500.000	5.000.000
5	Laporan/Publikasi	3.700.000	3.700.000
6	Lain-lain	1.500.000	1.500.000
	Total Anggaran	40.450.000	40.000.000
	Tota Anggaran Keseluruhan		80.450.000

DAFTAR PUSTAKA

- Gaillard, J.-C., E. Clavé, and I. Kelman. 2008. "Wave of peace? Tsunami disaster diplomacy in Aceh, Indonesia". *Geoforum*, vol. 39, no. 1
- Kelman, I. 2006. "Disaster Diplomacy: Hope Despite Evidence?". *World Watch Institute Guest Essay*, 2006
- , 2007. "Disaster diplomacy: Can tragedy help build bridges among countries?" *UCAR Quarterly*, Fall 2007
- , 2007. "Weather-Related Disaster Diplomacy". *Weather and Society Watch*, vol. 1, no. 3
- , I. 2008. "Disaster Diplomacy: Diplomats should not rely on disasters". vol. 47, 12 April 2008
- Kelman, I. and J.-C. Gaillard. 2007. "Disaster diplomacy in Aceh". *Humanitarian Exchange*, No. 37 (March 2007)
- Kelman, I. and T. Koukis (eds). 2000. 'Disaster Diplomacy', special section in *Cambridge Review of International Affairs* vol. XIV, no. 1
- Le Billon, P. and A. Waizenegger. 2007. "Peace in the Wake of Disaster? Secessionist Conflicts and the 2004 Indian Ocean Tsunami". *Transactions of the Institute of British Geographers*, vol. 32, no. 3
- Louise K. Comfort, "Disaster: Agent of Diplomacy or Change in International Affairs?", *Disaster Diplomacy Journal*, 2002
- Weizhun M, 2008, The Apocalypse of the Indian Ocean Earthquake and Tsunami". *World Politics and Economy* (Chinese Academy of Social Sciences), vol. 6
- Weizhun, M. and Q. Tianshu. 2005. "Disaster Diplomacy: A New Diplomatic Approach?". *Shanghai Institute For International Studies International Review*, Spring 2005
- <http://www.antaraneews.com/view/?i=1244199032> diakses pada 1 Maret 2010
- <http://www.sumbarprov.go.id/detail.php?id=347> diakses pada tanggal 14 Maret 2010
- <http://www.suaramedia.com/dunia-teknologi/sains/18235-potensi-gempa-indonesia-paling-tinggi-di-dunia.html> diakses pada tanggal 14 Maret 2010

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/07/02374315/diplomasi.regional.bencana.alam>

<http://www.berita2.com/nasional/umum/1328-menentang-bantuan-israel-untuk-gempa-sumbar.html>

<http://www.rakyatmerdeka.co.id/internasional/2009/12/16/7133/Diplomasi-Kemanusiaan-antara-Indonesia-dan-Hongaria->

http://www.indonesia.go.id/id/index.php/content/view/335/index.php?option=com_content&task=view&id=11803&Itemid=1&news_id=18

LAMPIRAN

Justifikasi Anggaran

Rincian Anggaran Tahun 2012

1.1. Anggaran untuk Pelaksana (Gaji dan Upah)

No	Nama Pelaksana	Peran/Kegiatan Utama	Jumlah jam/minggu	Honor/jam	Jumlah
1	Grace L,S.IP,M.Si	Peneliti Utama	12 x 40 minggu	10,000	4,800,000
2	Ratih H,S.IP,MA	Anggota	12 x 40 minggu	6.250	3.000.000
27	orang pembantu	Pembantu Peneliti	12,5 x 7 x 40	3,000	7,500,000
Jumlah					15,300,000

1.2. Anggaran Komponen peralatan

Nama Bahan/Peralatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
Kertas HVS 80 gram	10 rim	30.000	300.000
Kertas continous form 3 play	2 box	275.000	550.000
Alat tulis (notes, ballpoint, pensil, metaplan, kertas manila)	100 set	30.000	3.000.000
Flash disk 1 G	5 buah	120.000	600.000
CD Blank	2 pak	100.000	200.000
Tinta Printer Hitam	2 tube	250.000	500.000
Tinta Printer Colour	2 unit	225.000	450.000
Spidol white board	2 dos	50.000	100.000
Jumlah			5.600.000

1.3. Anggaran Komponen Perjalanan

Kota/Tempat Tujuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
Bantul	10 x 5 orang	30.000	1.500.000
Sleman	10 x 8 orang	31.250	2.500.000
Kota Yogyakarta	10 x 5 orang	30.000	1.500.000
Jakarta	1 X 2 orang	1.750.000	3.500.000
Jumlah			9.000.000

1.4. Anggaran Komponen Pertemuan/Lokakarya

Uraian Kebutuhan	Volume	Harga Satuan	Jumlah harga
Uang Transport peserta	50 org	50.000	2500.000
Konsumsi	60 org	50.000	3000.000
	Jumlah		5.500.000

1.5. Anggaran Komponen Laporan/Publikasi

Uraian Kegiatan	Volume	Biaya Satuan	Jumlah Harga
Penulisan draft laporan	1 laporan	700.000	700.000
Penggandaan draft laporan	30 ex	20.000	600.000
Revisi laporan	1 laporan	350.000	350.000
Foto copy dan penjilidan	10 laporan	30.000	300.000
Pengepakan dan pengiriman	1 kali	500.000	500.000
Publikasi dan dokumentasi	5 kegiatan	250.000	1.250.000
	Jumlah		3.700.000

1.6. Laporan Komponen Lain-Lain

Uraian Kegiatan	Volume	Biaya Satuan	Jumlah Harga
Rapat-rapat	10 kali	100.000	1.000.000
Penyusunan Instrumen	2 kali	250.000	500.000
			1.500.000

2. DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PENELITIAN

Tidak ada

3. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dipergunakan antara lain; computer, laptop, LCD projector, Overhead Projector, Tape Recorder, dan ruang kelas multimedia. Sarana ini adalah milik jurusan ilmu Hubungan Internasional Fisipol UMY, maupun jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas ANdalas, yang dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan penelitian dan sosialisasi modul peningkatan kapasitas birokrasi daerah dalam pengelolaan kebijakan diplomasi bencana alam.